

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBINAAN LEMBAGA MASYARAKAT DESA DI DESA MONDI KECAMATAN SEKADAU HULU KABUPATEN SEKADAU

Oleh:
HIRONIMUS ADVEN
NIM. E42010062

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 2015

E-mail : advenhironimus@gmail.com

Abstrak

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Pemerintah Desa dalam Memberikan Pembinaan terhadap Lembaga Masyarakat di Desa Mondri Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan kurang efektifnya kinerja lembaga masyarakat desa (PKK) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang diindikasikan karena pemerintah desa kurang menjalankan fungsi dalam membina PKK, sehingga dalam skripsi ini akan dideskripsikan dan dianalisis bagaimana pemerintah desa menjalankan tugasnya dalam membina PKK.

Kata-kata kunci : Peran Pemerintah Desa, Pembinaan, Lembaga Masyarakat (PKK)

THE ROLE OF VILLAGE GOVERNMENT TO DEVELOPE THE PUBLIC AGENCY IN MONDI VILLAGE, SEKADAU HULU SUB- DISTRICT, SEKADAU REGENCY

By:
HIRONIMUS ADVEN
NIM. E42010062

Science Of Government Program, Faculty Of Social And Political Science, Tanjungpura
University In Cooperation With The Government Of West Kalimantan Province, 2015

E-mail : advenhironimus@gmail.com

Abstract

This essay aims to describe and analyze the role of Village Government in Providing Guidance to community development agency (PKK) in Mondri village, Sekadau Hulu sub-district, Sekadau regency. The title of this essay concerns raised because of the development of family welfare agency (PKK) do not do their duties and function effectively that indicated by the village government do not do something in fostering them, so in this essay will be described and analyzed how the village government duties in fostering the Development Of Family Welfare agency (PKK).

Keywords : Role of Village Government, Development, Public Agencies (PKK)



PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Pemerintah Desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur, menata, melayani, memelihara, mempertahankan, dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka, Awang (2010 : 49). Pemerintah Desa merupakan ujung tombak pembangunan yang keberadaannya berhubungan langsung dengan masyarakat. Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian desa semakin dituntut kesiapannya dalam hal merumuskan kebijakan desa, merencanakan pembangunan desa yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Demikian juga dengan mengembangkan, membina dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kreatifitas serta inovasi masyarakat dalam mengelola

dan menggali potensi yang ada, sehingga tercipta desa yang otonom yaitu masyarakat desa yang mampu memenuhi kepentingan diperlukan.

Dalam suatu desa pemerintah dan masyarakat merupakan suatu kesatuan dalam sebuah sistem yang saling terkait satu sama lain. Sebuah pemerintahan terbentuk karena adanya keinginan kelompok masyarakat yang mengharapkan adanya keteraturan dalam tatanan kehidupan masyarakat, sehingga mereka mempercayakan kepada kekuasaan seseorang ataupun sekelompok orang untuk mengatur kelompok tersebut. Jika pemerintah merupakan sebuah kekuatan yang diamanatkan oleh masyarakat, maka kekuatan terbesar pemerintah berada di tangan rakyat.

Untuk itu pemerintah mempunyai tanggung jawab atas rakyatnya. Pemerintah desa khususnya mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat desanya untuk menumbuhkembangkan pendidikan, ekonomi, serta kesehatan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah desa harus berupaya penuh dalam meningkatkan berbagai faktor yang menunjang tumbuhkembangnya desa tersebut. Dengan demikian bukan hanya pemerintah desa yang harus bertanggung jawab untuk hal ini melainkan perangkat desa serta masyarakat desa itu sendiri.

Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menggerakkan perangkat-perangkat desa dan lembaga masyarakat untuk membantu proses pemerintahan desa, karena perangkat desa atau lembaga masyarakat adalah lembaga yang sangat dekat dengan masyarakat serta banyak mengetahui aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat desa tersebut.

Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menggerakkan perangkat-perangkat desa dan lembaga masyarakat untuk membantu proses pemerintahan desa, karena perangkat desa atau lembaga masyarakat adalah lembaga yang sangat dekat dengan masyarakat serta banyak mengetahui aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat desa tersebut.

Perhatian yang sungguh-sungguh harus dilakukan oleh pemerintah desa dalam menggerakkan lembaga masyarakat. Salah satu perhatian yang dapat dilakukan pemerintah desa adalah melakukan berbagai pembinaan yang dapat meningkatkan kreatifitas lembaga masyarakat sehingga lembaga masyarakat itu dapat membantu proses pembangunan. Dengan demikian masyarakat desa itu dapat berkembang, dan berkreaitifitas lebih baik, serta berdampak baik bagi proses pembangunan desa.

Sejalan dengan pembinaan diatas , Pamudji (1992:4) mengemukakan:

“perkataan pembinaan berasal dari kata bina yang artinya sama dengan membangun. Jadi pembinaan adalah pembangunan yang merubah sesuatu sehingga menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi. Dengan demikian pembinaan juga mengandung usaha-usaha membuat sesuatu lebih baik, sesuai serta cocok dengan kebutuhan menjadi baik dan bermanfaat”.

Fenomena yang terjadi di lapangan sekarang bahwa pembinaan lembaga masyarakat desa dirasakan sangat kurang. Dikatakan kurang karena lembaga masyarakat desa kurang terlihat aktivitasnya dan kurang berjalan dengan baik, khususnya Desa Mondri. Dari hasil pre survey dapat dilihat di Desa Mondri memang terpasang plang-plang nama lembaga masyarakat seperti plang nama lembaga PKK, LPMD, Lembaga Adat serta Organisasi Kepemudaan. Namun dalam kenyataannya tidak setiap lembaga-lembaga masyarakat di Kantor Desa berjalan dengan baik atau dapat dirasakan peranannya. Masyarakat desa kurang merasakan manfaat keberadaan dari lembaga-lembaga tersebut.

Masyarakat desa bahkan tidak mengetahui apa itu lembaga masyarakat dan apa saja tugas pokok serta fungsi dari lembaga masyarakat tersebut. Fenomena yang terjadi dilapangan yang saya lihat

yaitu Lembaga Masyarakat Desa cenderung tidak aktif yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti minimnya pembinaan dari pemerintah desa, kurangnya perhatian dari kepala desa dan pemerintah desa, potensi desa yang tidak tergarap dengan baik, menurunnya rasa kepedulian masyarakat, serta lebih mementingkan kepentingan sendiri

Untuk itu maka pemerintah khususnya Pemerintah Desa diharapkan bisa menyelesaikan masalah ini karena suatu penyelenggaraan pemerintah dapat dikatakan baik apabila berbagai permasalahan internal di desa dapat diatasi, dan selanjutnya mampu mewujudkan pelaksanaan tugas Pemerintah Desa yakni terciptanya pelayanan yang baik kepada masyarakat, adanya pembangunan yang dihasilkan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsi pemerintah desa.

Mengetahui pentingnya lembaga masyarakat maka penulis memfokuskan satu lembaga masyarakat yaitu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), yang merupakan organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan. Keberadaan PKK diharapkan dapat membantu proses berjalannya pembangunan desa dengan cara melaksanakan program-program serta

pembinaan langsung terhadap masyarakat. Pengorganisasiannya disusun secara berjenjang mulai dari Tim penggerak PKK di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan sampai di tingkat desa.

PKK menjadi gerakan untuk menghimpun data pelayanan beberapa aspek yang diperlukan seperti data warga, ibu hamil, bayi, dan balita, kelahiran, kematian, sampai kegiatan masyarakat. PKK juga harus menembus pemahaman agama yang kurang tepat, tentang pelarangan penggunaan alat kontrasepsi termasuk mereka harus memberikan penjelasan yang utuh tentang manfaat program KB kepada masyarakat yang rata-rata berpendidikan rendah, mereka membantu korban kekerasan perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat. PKK bergerak dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Program kerja PKK berorientasi pada hal-hal konkrit artinya PKK bergerak pada aksi-aksi nyata memberdayakan dan memihak kaum perempuan. Bukan hanya hal tersebut, PKK juga mempunyai andil besar dalam mensukseskan lomba desa.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa keberhasilan pelaksanaan pembinaan lembaga masyarakat desa terletak pada bagaimana peran serta pemerintah desa dan anggota TP PKK dalam perencanaan, pelaksanaan, dan

pengembangan hasil-hasil kegiatan PKK, terutama peran kepala desa dan perangkat desa dalam mengkoordinasi kegiatan PKK yang dapat berjalan secara selaras dan serasi. Kepala desa sebagai pemimpin diharapkan mampu untuk mengarahkan dan menggerakkan atau memotivasi seluruh lembaga masyarakat di desanya untuk turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik mengadakan penelitian yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan ilmiah dengan judul :
“PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBINAAN LEMBAGA MASYARAKAT DESA DI DESA MONDI KECAMATAN SEKADAU HULU KABUPATEN SEKADAU”.

2. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penulis dalam penelitian ini adalah proses pembinaan oleh pemerintah desa terhadap PKK di Desa Mondri Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau untuk menumbuhkan partisipasi dalam pembangunan desa, serta dapat membantu proses tugas tugas pemerintah desa sendiri.

3. Rumusan Permasalahan

Dan dari penjelasan di dalam latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah yaitu bagaimana pembinaan pemerintah desa terhadap PKK di Desa Mondri Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau.

4. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti adalah :

Untuk mengetahui pembinaan Lembaga Masyarakat Desa yaitu tim penggerak PKK yang dilakukan oleh Kepala Desa Dan Perangkat Desa.

Untuk mengetahui faktor apa yang menjadi penyebab tidak berkembang dan berjalannya tim penggerak PKK di Desa Mondri.

5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan yaitu ;

Manfaat Teoritis, Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi bagi penelitian-penelitian yang berkaitan dengan pembinaan lembaga masyarakat.

Manfaat Praktis, penelitian ini dapat bermanfaat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berfikir dan menulis karya ilmiah untuk penulis sendiri

selama mengenyam pendidikan di Program Studi Ilmu Pemerintahan.

Penelitian ini juga dapat sebagai bahan masukan atau bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Sekadau khususnya Desa Mondri dalam membuat kebijakan atau program kerja dan sebagai bahan evaluasi dalam penyempurnaan atas pelaksanaan program yang dilaksanakan.

B. KERANGKA TEORI DAN METODOLOGI

1. Kerangka teori

Selanjutnya, menurut pendapat Santoso S. (1995:52) yang mengungkapkan beberapa cara dilakukan dalam pembinaan adalah sebagai berikut:

1. Pemberian bimbingan;
dimana suatu pemerintah desa yang di dalamnya terdapat kepala desa dan perangkat desa mereka wajib memberikan bimbingan kepada lembaga masyarakat agar apa yang dikerjakan serta yang dilakukan lembaga masyarakat sesuai aturan serta sesuai dengan bimbingan yang dimaksud.
2. Memberikan pengarahan;
pengarahan yang di berikan agar lembaga masyarakat sendiri dapat mengarahkan masyarakat untuk

mengembangkan kemampuannya sesuai yang diinginkan lembaga masyarakat dan perangkat desa.

3. Memberikan pendidikan dan pelatihan;
memberikan pendidikan dan pelatihan kepada lembaga masyarakat bertujuan agar lembaga masyarakat dapat menguasai materi dan dapat menerapkannya langsung pada sasaran yang dimaksudkan yaitu masyarakat.
4. Memberikan intruksi-intruksi;
Intruksi disini adalah memantau pergerakan lembaga masyarakat serta mengontrol kegiatan sehingga apa saja yang salah dilakukan lembaga masyarakat dapat diarahkan lagi oleh pemerintah desa melalui intruksi yang dimaksud.
5. Memberikan buku petunjuk.
Buku petunjuk adalah suatu alat yang diberikan pemerintah desa terhadap lembaga masyarakat agar memudahkan lembaga masyarakat dalam melaksanakan tugasnya.

Pendapat diatas menunjukkan bahwa dengan pembinaan yang diberikan terhadap lembaga masyarakat desa melalui pemerintah desa memungkinkan dapat memperbesar tercapainya tujuan yang diharapkan. Oleh karena pemerintah desa mempunyai tugas yang penting terutama dalam hal pembinaan lembaga masyarakat sehingga dapat membantu pemerintah desa

dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa.

Maka dapat diketahui bahwa pembinaan adalah sesuatu tindakan atau usaha untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan secara terencana, terorganisir, terarah dan terpadu sehingga tercapailah pembinaan itu secara efektif dan efisien, selain itu pembinaan sangat penting sekali dalam proses pemerintahan bukan hanya pembinaan terhadap dusun-dusun atau hal lainnya namun hal ini sangat penting pada suatu lembaga masyarakat desa karena lembaga masyarakat desa dapat membantu proses perkembangan desa baik dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun peningkatan ekonomi masyarakat.

C. Hasil penelitian dan Pembahasan.

Sesuai dengan paparan bab sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Desa Mondi dalam pembinaan lembaga masyarakat di Desa Mondi Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau. Lembaga masyarakat yang menjadi sampel dalam hal ini dibatasi pada lembaga masyarakat program kesejahteraan keluarga (PKK) saja, yang mana ketua PKK dimaksud istri dari Kepala Desa Mondi Kecamatan Sekadau

Hulu Kabupaten Sekadau yang sudah 2 (dua) kali menjabat. Pembinaan yang dilakukan pemerintah desa terhadap lembaga masyarakat desa dapat dilakukan sesuai dengan metode atau cara yang diungkapkan oleh Santoso S, yaitu ; pemberian bimbingan, memberikan pengarahan, memberikan instruksi-instruksi, memberikan pendidikan dan pelatihan, serta member buku petunjuk.

Dari penjelasan tersebut, selanjutnya peneliti akan mengungkapkan hasil serta temuan dari penelitian yang dilakukan melalui teknik *purposive sampling* Sugiyono (2011:301) yang mengatakan "*purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti".

Bagaimana pembinaan yang diberikan pemerintah desa kepada lembaga masyarakat desa. Terlebih dahulu peneliti akan mendeskripsikan apa itu peran pemerintah desa dalam membina serta informasi yang peneliti dapatkan disaat melakukan penelitian di lapangan dan dilanjutkan dengan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan peran

pemerintah desa dalam membina kurang berjalan dengan efektif dan efisien.

Pembinaan terhadap lembaga masyarakat desa merupakan salah satu fungsi pemerintah desa yang sangat penting dan berpengaruh besar dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga masyarakat seperti tim penggerak PKK yang turut serta membantu tugas pemerintahan desa di desa sendiri. Namun setelah peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan terbukti bahwa dalam proses pembinaan belum terlaksana dengan baik serta masih banyak kekurangan yang dilakukan pemerintah desa sendiri dalam melakukan pembinaan kepada lembaga masyarakat tim penggerak PKK seperti ;

1. Memberikan Bimbingan

Pemberian bimbingan adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh seorang pemimpin untuk mengajak, menggiring, menuntun, memotivasi serta mendorong agar bawahan agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik serta dapat menjalankan segala aktivitas kegiatan sesuai dengan rencana. Yang dimaksudkan penelitian disini adalah dimana pemerintah Desa Mondi dapat mengajak, menggiring, menuntun, memotivasi serta mendorong lembaga masyarakat PKK desa sendiri agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik,

berkaitan dengan urusan meningkatkan kreatifitas kemampuan masyarakat, kerja sama, pemerhatian kesehatan, serta pengembangan pola pikir masyarakat di desa sendiri sesuai dengan tugas dan tupoksi PKK sendiri. Pemberian dukungan dan arahan kepada PKK yang adalah salah satu lembaga masyarakat dimaksudkan agar tumbuh motivasi dalam melaksanakan tugas sehingga lembaga masyarakat PKK lebih terpacu untuk berinovasi dan berkreasi untuk melaksanakan kegiatannya. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pemerintah Desa Mondi belum melaksanakan fungsinya dengan baik dalam memberikan bimbingan terhadap lembaga masyarakat PKK. Kurangnya sosialisasi, seperti sikap mengajak dan menggiring serta pemberian motivasi yang sebenarnya harus dilakukan pemerintah desa yang merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam melakukan pembinaan

2. Memberikan Pengarahan

Pengarahan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua yang diarahkan mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan dari yang memberikan pengarahan, artinya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama yang dilakukan untuk mencapai suatu

tujuan yang dikehendaki secara efektif dan efisien.

Pengarahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk memberikan arahan, petunjuk atau langkah-langkah yang harus dilakukan lembaga masyarakat PKK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Pemberian arahan yang baik membuat pekerjaan yang dimiliki oleh PKK menjadi baik, hal ini disebabkan PKK mengerti dengan tugasnya karena telah mendapat arahan dari Pemerintah Desa dan Kepala Desa. Tetapi berdasarkan hasil penelitian saya temukan di lapangan, pemerintah desa belum melaksanakan fungsinya dalam memberikan pengarahan terhadap PKK.

3. Memberikan Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dimaksudkan adalah untuk membina kemampuan atau mengembangkan kemampuan dan pelatihan proses belajar mengajar yang menggunakan metode. Jadi, pendidikan dan pelatihan adalah suatu proses pembinaan, pengertian, pengetahuan, dan juga untuk menambah keterampilan.

Memberikan pendidikan dan pelatihan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kegiatan yang dilakukan pemerintah desa dalam membekali PKK melalui pendidikan dan pelatihan

agar mereka mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pendidikan dan pelatihan yang ada diharapkan nantinya agar PKK mampu mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik yang dibebankan kepadanya tanpa arahan langsung dari Pemerintah Desa dan Kepala Desa. Pendidikan dan pelatihan dapat dipandang sebagai salah satu jalur untuk meningkatkan kemampuan PKK dalam memperbaiki kinerja PKK sendiri. Pentingnya program pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggota tim penggerak PKK desa dalam mengelola kegiatan-kegiatan sesuai dengan tupoksinya.

Pendidikan dan pelatihan adalah merupakan upaya untuk memberdayakan tim penggerak PKK desa untuk meningkatkan kemampuan intelektual dengan kepribadian manusia. Dengan demikian diperlukan upaya-upaya yang sistematis dalam meningkatkan kapasitas agar mampu bekerja secara optimal dalam peningkatan kinerja PKK. Tetapi kejadian di lapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan serta,

4. Memberikan intruksi dan buku petunjuk

Juga belum tepat sasaran tetapi dalam pemberian buku petunjuk lumayan dapat terlihat karena PKK mendapatkan buku-buku dari pemerintahan desa mondi

seperti buku tentang bercocok tanam dan buku-buku kesehatan masyarakat yang dapat berguna.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin dan sebani, 2007. **Manajemen Sumber Daya Manusia**. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hidayat. 1990. **Organisasi Publik**. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mangunharja. 1986. **Penelitian, Arti Dan Metodenya**. Yogyakarta: Kamisius.
- Moleong, Lexi J. 2010. **Metode Penelitian Kualitatif**. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pamudji. 1992. **Pembinaan Organisasi**. Jakarta: Gunung Agung.
- Saydam, gouzali. 1997. **Manajemen Sumber Daya Manusia**. Jakarta: Gunung Agung.
- Salam faisal, 2003. **Penyelesaian Sengketa PNS Di Indonesia**. Bandung: Madar Maju.
- Sugiyono, 2011. **Metode Penelitian Kombinasi**. Bandung: Alvabeta.
- Santoso, 1995. **Pembinaan Dalam Organisasi**. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Thoha, Miftah. 2003. **Definisi-Definisi Prima Ilmu Administrasi Negara**. Jakarta: PT. Raja Pratindo Persada.
- Tohardi, Ahmad. 2011. **Pedoman Penulisan Skripsi**. Pontianak: Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip Utiversitas Tanjung Pura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Peraturan-Peraturan

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 1.

Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Rujuka elektronik

Sumber www.sekadaukab.bps.go.id/

<http://hukum.unsrat.ac.id/>

[men/mendagri2007_5.pdf#page=1
&zoom=auto,NaN,NaN](http://men/mendagri2007_5.pdf#page=1&zoom=auto,NaN,NaN)

[http://elib.pdii.lipi.go.id/katalog/index.php/
searchkatalog/downloadDataById/2
71444/11_01434.pdf](http://elib.pdii.lipi.go.id/katalog/index.php/searchkatalog/downloadDataById/271444/11_01434.pdf)

([http://www.riapos.co/kolom.php?act=ful
l&id=321&kat=7](http://www.riapos.co/kolom.php?act=full&id=321&kat=7)).

<http://eprints.undip.ac.id/>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kode Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : HIRONIMUS ADVEN
NIM / Periode lulus : E42010062 / 2014
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / HP : advenhironimus@gmail.com / 085787299355

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1),
menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program
Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas
Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBINAAN LEMBAGA MASYARAKAT DESA
DI DESA MONDI KECAMATAN SEKADAU HULU KABUPATEN SEKADAU**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini,
Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk
pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet
atau media lain :

- ☐ fulltext
☒ content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala
bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal.....

H. Wijaya Kusuma, MA, Ph.D
NIP. 196202141986031001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 30 Juni 2015

(HIRONIMUS ADVEN)